

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN CHINA DAN INDIA

Bab ini menjelaskan tentang dinamika hubungan China dan India yang diawali pada tahun 1950an hingga tahun 2017. India dan China merupakan dua negara memiliki pengaruh yang kuat di kawasan Asia dan merupakan dua negara dengan kekuatan global baru. Kedua negara ini memulai hubungan bilateral nya pada tahun 1950 dan membangun kerjasama yang lebih erat karena memiliki kesamaan latar belakang yaitu sama-sama dijajah oleh imperialisme barat yang mengeksplotasi China India yang dianggap memiliki pertumbuhan signifikan. Namun, hubungan kedua negara mulai merenggang akibat adanya masalah perbatasan yang melibatkan kedua negara. Konflik tersebut terjadi selama puluhan tahun yang membuat hubungan kedua negara semakin memanas.

A. Sino-Indian War 1962

Jawaharlal Nehru yang menjabat sebagai perdana menteri India pada periode 1947-1964, membuat perjanjian Panchsheel antara China dan India pada tahun 1954. Perjanjian Panchsheel ini berisikan tentang 5 hal yang ditekankan untuk kedua negara tersebut, yaitu (a) saling menghormati integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing negara, (b) non-agresi untuk kedua negara tersebut, (c) tidak saling mengganggu dalam urusan masing-masing negara, (d) adanya kesetaraan dan saling menguntungkan kedua negara, (e) Koeksistensi damai (Van Eekelen, 1967, hal. 38).

Hubungan kedua negara mulai memburuk setelah tahun 1959 dikarenakan sengketa perbatasan yang mengakibatkan adanya konflik perebutan wilayah dataran Aksai Chin dan Garis McMahon di Arunachal Pradesh. Konflik Sino-Indian War ini ditandai dengan adanya penarikan duta besar oleh masing-masing negara (Hongyu, 1995).

Gambar 2.1 : Wilayah Konflik Sino-Indian



Sumber : India Defence Review

China mengklaim bahwa Tibet merupakan bagian dari negara tersebut dan berada dibawah kekuasaan China. Tahun 1947 setelah India merdeka, pemerintahan India juga mengklaim Garis McMahon karena menganggap bahwa India mewarisi seluruh perjanjian teritorial Inggris yang berarti Garis McMahon juga merupakan hasil warisan Inggris yang diakui oleh India. Keyakinan India didukung dengan adanya Konvensi Simla pada tahun 1914 yang menyatakan bahwa China hanya menguasai sebagian dari wilayah Tibet. Namun dari pihak China sendiri tidak menganggap adanya Konvensi Simla dan Garis McMahon yang diklaim oleh India karena pada saat adanya perundingan Konvensi Simla, China tidak menyetujui dan tidak menandatangani hasil dari perundingan tersebut (Anand, 2012, hal. 234). Invasi China terhadap Tibet hingga melakukan penindasan kepada pemberontak Tibet merupakan upaya yang dilakukan untuk menegaskan dominasi nasionalnya di wilayah tersebut. Luas dari wilayah sengketa ini sekitar 5000mil persegi dan merupakan wilayah terpencil yang sulit untuk diakses (Devereux, 2009, hal. 72).

Hubungan kedua negara memanas ketika tentara India mengetahui bahwa China melanggar integritas wilayah India

dengan membangun jalan militer yang menghubungkan antara China (Xinjiang) dan Tibet yang berada di daratan Aksai Chin yang merupakan wilayah yang diklaim oleh China dan India. India menganggap bahwa dataran Aksai Chin merupakan bagian dari wilayah Kashmir yang berada dibawah kekuasaan India dan China menganggap bahwa dataran Aksai Chin merupakan bagian dari wilayah Xinjiang (Szczepanski, 2018). Kedua negara menolak untuk melakukan negosiasi dalam menyelesaikan konflik perbatasan tersebut karena China menolak untuk menarik pasukan militernya dikawasan sengketa ketika proses negosiasi berlangsung.

Akibat dari adanya perebutan wilayah tersebut, pada tahun 1962 terjadi perang antara pasukan tentara China dan India. Gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara membuat Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengeluarkan kebijakan baru yaitu "*Forward Policy*". Kebijakan ini membawa India untuk meletakkan militernya di kawasan yang telah di klaim oleh China. Dengan adanya *Forward Policy*, India mulai membangun beberapa pos militer di wilayah sengketa timur maupun barat yang dimana dalam kebijakan tersebut merupakan langkah memasuki fase provokatif dan ofensif baru. Adanya kebijakan "*Forward Policy*" ini merupakan upaya India mampu untuk menahan China yang semakin memperluas kedudukannya di wilayahs sengketa. Kebijakan baru India membuat China merasa terancam akan kehilangan teritorialnya. Kemudian China mengeluarkan respon yang mengancam India untuk menghentikan kebijakan barunya tersebut atau perang tidak akan pernah berakhir. China juga berupaya untuk terus menambah pasukan militernya di wilayah yang dekat dengan pasukan militer India.

Pada 20 Oktober, militer China melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah timur maupun barat India. Persiapan India menghadapi serangan China sangat minim karena serangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba. India tidak

memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan serangan dari China. Setelah melakukan serangan terhadap militer India, China berhasil menguasai Aksai Chin di front barat. Pada front timur China berhasil menyerang pasukan militer India yang berada di selatan sungai Namka. Keberhasilan dalam menyerang militer India membuat China mengeluarkan gencatan senjata (Lu, 2007, hal. 8). Tidak hanya gencatan senjata yang dilakukan, namun China juga memberikan penawaran agar India menyetujui adanya perundingan kedua negara mengenai perbatasan wilayah. Jika India menerima penawaran yang diberikan, maka China akan menarik pasukan militernya yang telah diletakkan di beberapa wilayah di daerah sengketa. Kemudian muncul penolakan dari India untuk melakukan perundingan yang ditawarkan oleh China. India tetap ingin melanjutkan konflik perbatasan ini dan akan mempersiapkan militernya untuk menyerang China kembali (Maxwell, 1999, hal. 913).

Keberanian India untuk melawan China muncul karena adanya dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris yang merupakan negara kuat yang dapat membantu India dalam mengalahkan China dan memenangkan konflik perbatasan tersebut. Penolakan dari India terhadap penawaran perundingan tersebut membuat China semakin memperluas keamanan militernya di kawasan sengketa dan juga menyusun strategi yang akan dilakukan jika mendapat serangan dari India. Hal itu dilakukan China sebagai upaya untuk menanggulangi adanya serangan yang diberikan oleh India.

Setelah gencatan senjata dikeluarkan oleh China, pada 14 November terjadi serangan balik yang dilakukan oleh India yang menyerang pasukan militer China. Meskipun pada perang ke-2 ini India dapat menguasai kota Walong yang merupakan wilayah milik China, India tetap mengalami kekalahan di akhir perang. China dengan strateginya melumpuhkan militer India berhasil menguasai seluruh wilayah sengketa dan mengeluarkan gencatan senjata secara sepihak karena China

berhasil menguasai seluruh wilayah sengketa dan perang tersebut berakhir pada 22 November 1962. Setelah perang tersebut berakhir, hubungan diplomatik antara China dan India terputus. Setelah tahun 1970 India dan China kembali membangun hubungan diplomatik kedua negara.

B. Konflik Perebutan Wilayah Kashmir

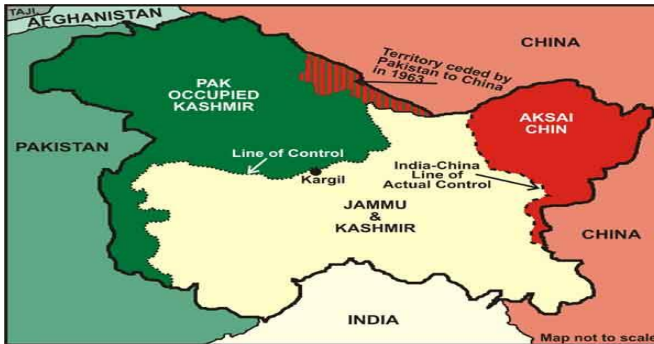
Pada tahun 1846, Inggris memberikan wilayah Kashmir kepada penguasa dogra hindu, Gulab Singh melalui perjanjian Amritsar. Wilayah Jammu dan Kashmir memiliki penduduk mayoritas muslim berasal dari Pakistan dan minoritas hindu, sikh, dan budha berasal dari India. Ketika Pakistan dan India merdeka pada tahun 1947, pemimpin dogra hindu dilema untuk memberikan wilayah kashmir ini kepada Pakistan atau India karena pemimpin dora merupakan umat hindu sedangkan mayoritas penduduk di wilayah Kashmir merupakan umat islam. Sejak saat itu Pakistan dan India berkonflik seperti perang dan negosiasi untuk memperebutkan legalitas di wilayah Kashmir tersebut hingga pada tahun 1949 (Schofield, 2010).

Upaya yang dilakukan PBB dengan mengirimkan perwakilan Owen Dixon untuk penyelesaian konflik dengan mengeluarkan referendum pada wilayah yang bersengketa mengalami kegagalan dan membuat India dan Pakistan berperang pada tahun 1952 dan 1971. PBB memberikan solusi untuk India dan Pakistan dalam pertemuan simla 1972, Tashkent 1966, yang mendapat penolakan dari kedua negara dalam penyelesaian konflik perbatasan tersebut.

Gencatan senjata 1984 yang dikeluarkan oleh PBB berada di gletser Siachen berjarak 40mil dari perbatasan China yang juga dikuasai oleh India pada saat India dan Pakistan berperang di kawasan tersebut. Pada tahun ini China ikut mengklaim wilayah Kashmir yang berada di perbatasan China yang juga diklaim oleh Indian dan Pakistan. India mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang berada di selatan dan timur wilayah tersebut. Pakistan mengklaim bagian wilayah Azad Kashmir, Gilgit dan Baltistan yang berada di barat dan timur

Kashmir. Sedangkan China mengklaim wilayah di bagian timur laut Kashmir yaitu wilayah Aksai Chin dimana China telah membangun jalan di kawasan tersebut untuk menghubungkan provinsi Sinkiang dengan Tibet (Ariyanti, 2019).

Gambar 2.2 : Peta pembagian wilayah Kashmir.



Sumber : Indian Defence Review, 2015

Dalam hal ini, pemerintah Pakistan melakukan perundingan dengan pemerintah China mengenai wilayah Kashmir Utara, dan mendapat respon yang kurang positif dari pihak India. China mengeluarkan kebijakan pro Pakistan pada tahun 1970 yang dimana China memberikan dukungan keamanan untuk Pakistan selama konflik Pakistan-India ini berlangsung. Melalui dukungan keamanan ini China membantu dalam pengembangan industri militer Pakistan. Kebijakan yang dikeluarkan China dalam menghadapi konflik perebutan wilayah Kashmir ini adalah :

1. Beijing mendeklarasikan posisinya terhadap perebutan wilayah ini.
2. Dukungan china terhadap keamanan Pakistan selama konflik India Pakistan berlangsung.
3. Beijing mendukung secara substansi terhadap pengembangan industri militer Pakistan dalam perebutan wilayah atas Kashmir.

4. Sikap Beijing mengenai alternatif penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan Kashmir.
5. Kepentingan dan kebijakan China mengenai alternatif penyelesaian substantif dalam masalah Kashmir.
6. Kepentingan China dalam mencapai pengaruh politik dengan New Delhi dan Washington melalui masalah Kashmir (Garver, 2004).

India melihat sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh China sebagai bentuk keberpihakan China terhadap Pakistan yang membuat hubungan China dan India merenggang.

C. Hubungan Bilateral Pasca Sino-Indian War 1962

Pada tahun 1988, perdana menteri India Rajiv Gandhi mengunjungi China untuk membuka hubungan diplomatik yang baru antar dua negara setelah terjadinya konflik Sino Indian pada tahun 1962 (Das, *India-China Defence Cooperation and Military Engagement*, 2010, hal. 109 Vol. 4 No. 4). Kedatangan PM India ke China bertujuan untuk membuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan antar kedua negara tersebut. Kerjasama dalam memperbaiki hubungan diplomatik antara China dan India adalah *Joint Working Group* (JWG). Dalam kerjasama ini kedua negara sepakat untuk mengembangkan bidang pertahanan, keamanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dibentuknya JWG dalam kerjasama pengembangan dalam bidang pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan dianggap sangat penting dalam kelanjutan hubungan bilateral kedua negara. Hal itu dapat membangun rasa kepercayaan pasukan militer kedua negara dalam melakukan tugasnya seperti memberantas adanya terorisme atau ketika terjadi bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

Tidak hanya PM India yang mengunjungi China namun juga Menteri Pertahanan India yang mengunjungi China pada tahun 1992. Kunjungan menteri pertahanan Sharad Pawar

dalam membangun kerjasama dengan China ini menghasilkan penandatanganan Perjanjian Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan di Wilayah Perbatasan serta *Line of Actual Control* (LAC) yang merupakan garis perbatasan antara India dan China di Arunachal Pradesh. Penandatanganan perjanjian ini di sahkan pada 7 September 1993 (Das, *India-China Defence Cooperation and Military Engagement*, 2010, hal. 110 Vol. 4 No. 4).

Setelah terbentuknya JWG antar kedua negara, pada tahun 1996 Presiden China Ziyang Zemin mengunjungi India untuk mempererat kembali hubungan bilateral antara kedua negara. Setelah pertemuan tersebut terbentuklah perjanjian antara Pemerintah Republik Rakyat China dengan Pemerintah Republik India yang tercantum dalam *Confidence Building Measures* (CBM) yang merupakan penegasan dari perjanjian yang sudah ada sebelumnya (Siddiqi, 2012, hal. 63 Vol. 65 No. 2). Isi dari perjanjian CBM dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang militer ini yaitu (Das, *India-China Defence Cooperation and Military Engagement*, 2010, hal. 111 Vol. 4 No. 4);

1. Pengurangan dan pembatasan penggunaan senjata seperti tank tempur, kendaraan tempur infanteri, senjata dengan kaliber 75mm atau lebih, mortir dengan kaliber 120mm atau lebih, rudal permukaan ke permukaan, rudal permukaan ke udara, dan sistem senjata lainnya.
2. Pertukaran data mengenai pengurangan senjata oleh kedua pihak negara, dan penyimpanan senjata yang akan disimpan oleh masing-masing pihak di zona geografis yang sudah disepakati disepanjang garis perbatasan India dan China.
3. Pemberitahuan kepada masing-masing negara mengenai penyelesaian latihan dan pelepasan pasukan militer dalam jangka waktu lima hari.
4. Kedua negara berhak mendapatkan klarifikasi dari pihak yang sedang melakukan pelatihan militer.

Setelah kerjasama bilateral yang terbangun kembali oleh kedua negara pasca Sino-Indian War 1962, di tahun 1998 hubungan antar kedua negara tersebut mengalami kemunduran yang disebabkan oleh India yang melakukan uji coba nuklir pada saat itu (Gupta & Shukla, 2009). Uji coba nuklir India dilakukan pada masa pemerintahan Atal Bihari Vajpayee dan menteri pertahanan George Fernandes yang pada saat itu menganggap bahwa China merupakan ancaman untuk keamanan negara India itu sendiri.

Meskipun mengalami kemunduran hubungan bilateral yang diakibatkan oleh uji coba nuklir, China dan India terus berupaya dalam menjalin hubungan bilateral kedua negara untuk meredakan adanya konflik perbatasan yang sempat terjadi pada tahun 1962. Dapat dilihat pada April 2005, Perdana Menteri China Wen Jiabao mengunjungi India tepatnya di New Delhi untuk menandatangani protokol yang ada dalam CBM yang telah dibuat pada tahun 1996. Isi dari protokol yang ditandatangani oleh PM Wen Jiabao yaitu tentang parameter politik dan prinsip-prinsip panduan untuk penyelesaian batas India-China (Siddiqi, 2012).

China-India mempererat hubungan dengan cara menandatangani MoU yang dilakukan ketika Menteri Pertahanan India Pranab Mukherjee berkunjung ke Beijing, China. Kedua negara menandatangani MoU guna membangun rasa saling percaya antar masing-masing pihak termasuk rasa kepercayaan dalam angkatan bersenjata. Maka dari itu kedua negara memutuskan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan untuk menjaga rasa kepercayaan dan juga terciptanya lingkungan yang damai untuk membangun kepentingan nasional masing-masing negara (Ministry Of External Affairs, 2006).

Setelah penandatanganan MoU, pada November 2006 Hu Jintao yang pada saat itu menjabat sebagai presiden China mengunjungi India untuk membahas tentang penyelesaian

permasalahan perbatasan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan kedua negara dan juga memiliki tujuan strategis untuk masing-masing negara. Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Hu Jintao ini menghasilkan 10 strategi yang akan diterapkan oleh kedua negara untuk membangun hubungan bilateral yang sempat merenggang karena konflik perbatasan tersebut (Pokharna, 2009).

Strategi hubungan bilateral yang disepakati oleh kedua negara yaitu, pengembangan hubungan kedua negara secara komprehensif, pengembangan hubungan pertukaran ekonomi atau perdagangan, memperkuat hubungan kelembagaan kedua negara, menanamkan rasa kepercayaan masing-masing negara dengan cara kerjasama dalam bidang pertahanan, kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempromosikan konektivitas dan kerjasama perbatasan, menemukan penyelesaian pada masalah yang beredar antar dua negara, merevitalisasi ikatan budaya dua negara dengan cara mengadakan pertukaran sumber daya manusia, serta melakukan kerjasama dalam isu regional dan internasional.

Dalam upaya nya membangun hubungan bilateral yang erat tidak hanya melalui bidang keamanan dan pertahanan saja, namun juga meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi yang hal ini dapat membuat kedua negara menjadi lebih saling ketergantungan satu sama lain. Kerjasama yang lebih erat dalam bidang ekonomi ini dapat membuat China dan India mendominasi pasar teknologi informasi secara mendunia. Upaya yang dilakukan untuk memperlambat hubungan dalam bidang ekonomi yaitu pada periode April 2008 hingga Februari 2009, China muncul sebagai mitra dagang terbesar India menggantikan Amerika Serikat (Nagel, 2015).

Pada 15-17 Desember 2010, PM China Wen Jiabao mengunjungi India. Hasil dari kunjungan PM China ke India yaitu, kedua negara menyetujui tentang kerjasama dalam bidang ekonomi yang dimana kedua negara menyetujui adanya target

perdagangan baru sebesar 100 miliar dollar yang harus tercapai di tahun 2015. Selain itu untuk membantu defisit yang dialami oleh India, kedua negara sepakat untuk mempromosikan ekspor India (BBC, 2010).

Ketertarikan India membangun kerjasama dengan China ini dapat dilihat pada forum yang diikuti oleh kedua negara tersebut seperti, KTT Asia Timur , G20, dan juga BRICS (Brazil,Russia,India,China,South Africa). Selain itu India dan China juga termasuk bagian dari negara yang terlibat dalam perdagangan bebas RCEP, dan juga bagian dari negara yang menandatangani *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Perdagangan bilateral antara China dan India mengalami kenaikan menjadi 70.8 miliar dollar pada tahun 2016 yang sebelumnya di tahun 1999 perdagangan bilateral antar kedua negara senilai 1.99 miliar dollar (Chopra, 2017).

D. Konflik Dataran Tinggi Doklam

Setelah hubungan bilateral yang dibangun oleh kedua negara tersebut pasca adanya perang pada tahun 1962, hubungan kedua negara mulai merenggang kembali akibat adanya konflik yang terjadi di tahun 2017. Penyebab terjadinya konflik pada tahun 2017 sama halnya dengan tahun 1962 yaitu konflik perbatasan wilayah dataran tinggi doklam yang dimana wilayah ini berada di Himalaya diantara China, India, dan Bhutan.

Gambar 2.3 : Wilayah Dataran Tinggi Doklam



Sumber : *South China Morning Post*

Doklam ini berada di sepanjang 220m garis perbatasan antara China dan India. Konflik perebutan wilayah ini sebenarnya dialami oleh China dan Bhutan yang dimana memperebutkan dataran tinggi doklam, namun Bhutan merupakan sekutu dari India. Karena secara militer China lebih kuat daripada Bhutan, maka Bhutan membangun aliansi dengan India untuk memenangkan konflik perebutan wilayah tersebut. Bhutan dan India menganggoa bahwa dataran tinggi doklam berada 200m di sebelah tenggara wilayah Batang-La, sedangkan China menganggap doklam ini berada di pegunungan Gipmochi yang berada di 2,5km selatan situs Doka La, Himalaya dan berada di perbatasan antara Sikkim, Bhutan, dan India bagian utara yang merupakan persimpangan yang diklaim oleh China. Kokohnya pertahanan China mengkalim wilayah dataran tinggi doklam ini karena menteri pertama India, Jawahrlal Nehru yang menegaskan dukungan terhadap China mengenai perbatasan wilayah ini melalui surat yang diberikan kepada perdana menteri China, Zhou Enlai pada tahun 1959 (Panda, 2017). Adanya konvensi Simla yang menentukan wilayah Sikkim di perbatasan China dan India yang dimana juga menentukan dataran tinggi doklam merupakan wilayah China dan berada di sisi perbatasan China.

Masalah perebutan wilayah dataran tinggi doklam sudah terjadi cukup lama namun tidak menghasilkan penyelesaian antar negara yang bersengketa. Pada tahun 2017 konflik ini kembali muncul karena aksi yang dilakukan oleh China untuk menegaskan dominasinya di wilayah tersebut. Aksi yang dilakukan oleh China tersebut berupa pembangunan jalan di wilayah sengketa tersebut yang dimana China menganggap wilayah pembangunan jalan itu merupakan milik China dan bukan milik Bhutan maupun India. Hal ini membuat India untuk menambah pasukan militernya di kawasan konflik tersebut, tentu untuk membantu Bhutan yang merupakan aliansi dari India. China menanggapi aksi India tersebut yang membantu Bhutan untuk menguasai wilayah konflik dengan cara memberikan ancaman terhadap India jika India terus menambah pasukan militernya di wilayah tersebut (Ganguly, 2017). Selain aksi dari China yang membangun jalan di kawasan sengketa tersebut, India juga memasuki kawasan China yang berada di dataran tinggi doklam secara ilegal. Hal ini dianggap mengganggu China dalam proses pembangunan jalan di kawasan tersebut.

Akibat dari aksi yang dilakukan masing-masing negara membuat pasukan militer yang berada di wilayah tersebut melakukan serangan satu sama lain. Serangan tersebut berupa pelemparan batu di kawasan Danau Pangong yang dilakukan oleh militer China (Kertopati, 2017). Danau Pangong juga merupakan bagian dari wilayah Dataran Tinggi Doklam yang sedang menjadi wilayah konflik antara China, Bhutan, dan India. Selain serangan berupa lemparan batu tersebut kedua negara juga mengalami perang media lokal yang dimana masing-masing negara melempar cercaan satu sama lain di berbagai macam media kedua negara tersebut. Di wilayah dataran tinggi Doklam yang sedang bersengketa tersebut kini sudah terdapat 300 pasukan militer dari dua negara yang diletakkan dengan jarak 150m (Hardoko, 2017).

Sulitnya penyelesaian masalah antar negara yang diakibatkan oleh konflik perbatasan membuat China dan India yang semula hubungannya memanas memilih untuk melakukan diplomasi. India berharap adanya jalur diplomasi yang akan dilakukan oleh kedua negara ini dapat menemukan penyelesaian konflik perbatasan yang terjadi dan juga melalui diplomasi ini akan menjaga hubungan bilateral antar kedua negara. China menyetujui adanya diplomasi tersebut jika India menarik pasukan militernya dari wilayah konflik. Hasil akhir yang didapatkan dari penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi ini adalah Menlu China dan India sepakat untuk menarik pasukan militer dari wilayah perbatasan (Miglani & Blanchard, 2017). Kesepakatan tersebut dilakukan saat menjelang dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada September 2017 yang dilaksanakan di China.

E. Kesimpulan

Hubungan China dan India mengalami pasang surut yang disebabkan oleh adanya konflik perebutan wilayah perbatasan yang terjadi puluhan tahun dimana mereka merupakan negara bekas jajahan dari Barat yang membuat kedua negara memiliki pandangan yang berbeda terhadap garis wilayah teritorial jika dilihat dari sejarah. Setelah Sino-Indian War pada tahun 1962 berakhir, kedua negara mengalami konflik kembali pada tahun 2017 yang disebabkan oleh perebutan wilayah Dataran tinggi doklam yang sebenarnya adalah konflik antara China dan Bhutan. Namun, kedua negara memiliki upaya dalam mengembalikan kembali hubungan bilateral yang telah dibangun dengan baik melalui berbagai macam perjanjian dan juga kerjasama antar kedua negara. Berbagai bentuk diplomasi sudah dilakukan untuk meredakan konflik yang tidak berujung tersebut dan pada akhirnya kedua negara sepakat untuk menarik pasukan militer di kawasan konflik agar tidak terjadi serangan yang membuat hubungan kedua negara semakin memanas. Berbagai macam kontribusi dalam Organisasi Internasional

(OI) juga telah dilakukan oleh kedua negara untuk memperbaiki hubungan bilateral yang sempat merenggang.